

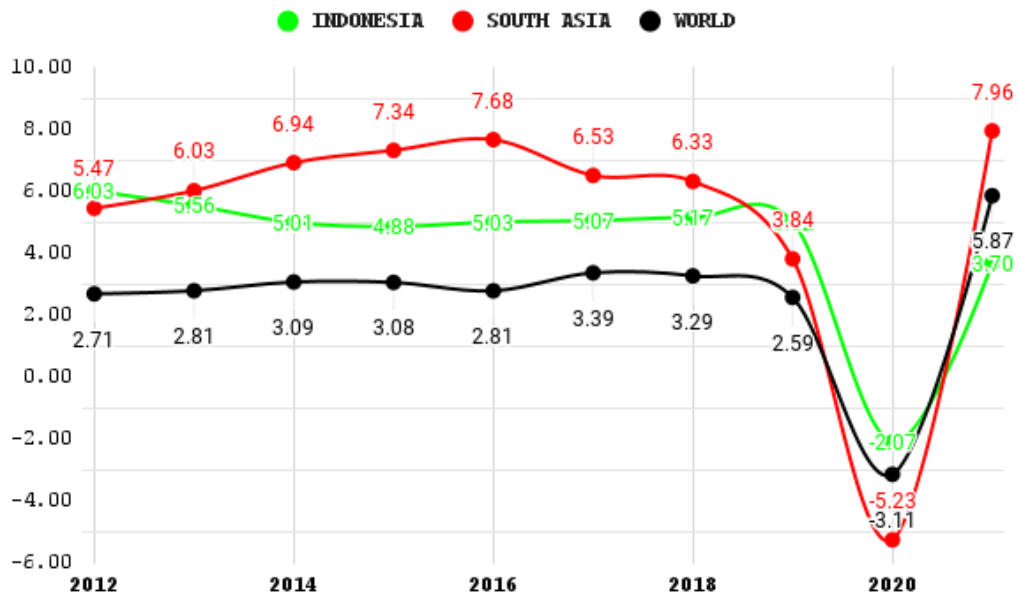
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Resesi global yang terjadi pada tahun 2020 lalu akibat dari pandemi COVID-19 merupakan resesi yang terdalam sejak perang dunia kedua. Menurut hasil penelitian dan pembuktian dari Ayhan & Paper (2021) bahwa resesi tersebut merupakan resesi global tercepat karena pemulihan begitu cepat terjadi secara global. Hal ini didukung oleh langkah-langkah kebijakan ekonomi makro seperti hampir semua negara maju dan sekitar setengah dari negara berkembang menargetkan target inflasi berkelanjutan dengan ekspektasi rendah dan stabil.

Secara umum, krisis ekonomi yang terjadi akan menimbulkan serangkaian masalah sosial-ekonomi pada masyarakat. Krisis keuangan pada beberapa perusahaan atau sektor ekonomi riil terkena dampaknya, pemutusan hubungan kerja atau meningkatnya tingkat pengangguran secara masif, menurunnya daya ekonomi dan penurunan kualitas hidup/kesehatan masyarakat. Terakhir, krisis seperti COVID-19 yang sangat cepat berdampak akibat aturan yang ditetapkan seperti aturan tinggal di rumah, penutupan bisnis sementara, sebagian tenaga kerja yang terinfeksi dan ditambah lagi dengan ketidakpastian durasi dan dampak ekonomi jangka menengah dan panjang. Akibatnya, pembuat kebijakan harus merespon dengan cepat dalam membuat kebijakan moneter dan fiskal untuk meminimalisir/menahan krisis yang terjadi (Armantier et al., 2021).

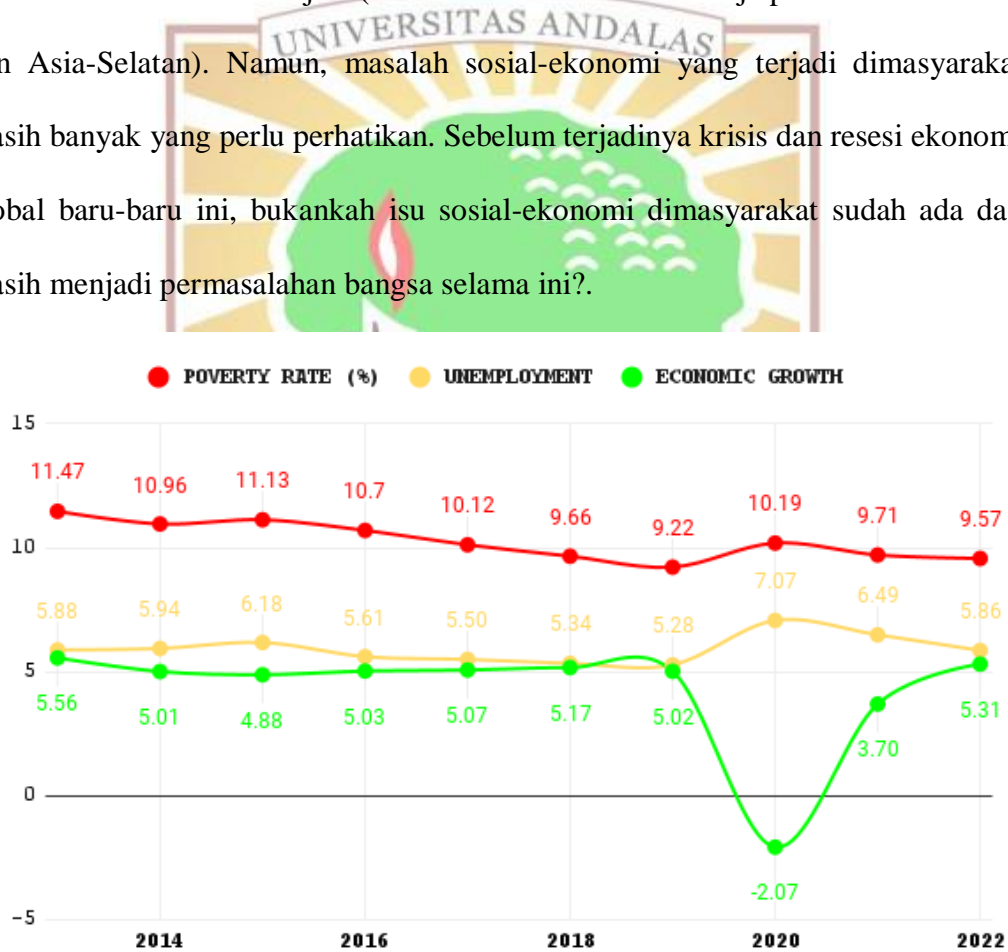


Gambar 1.1 Grafik tren pertumbuhan ekonomi Indonesia, Asia Selatan, dan Dunia dari tahun 2013-2022 (sumber : World Bank)

Ademola & Badiru (1981) menyatakan bahwa perlu perhatian khusus terhadap negara berkembang pada masalah sosial-ekonomi akibat terjadinya resesi dan depresi ekonomi. Peran otoritas dan pembuat kebijakan pasca krisis ekonomi periode pemulihan ekonomi ini bisa dilihat pada UU Nomor 2 Tahun 2020 atas respon kebijakan negara dan fiskal untuk menghadapi risiko pandemi COVID-19. Bank Indonesia yang memiliki fungsi memelihara kestabilan nilai rupiah, melalui pengelolaan bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan pada saat itu membuat kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Berdasarkan laporan perekonomian Bank Indonesia

(2022) beberapa kebijakan yang dibuat untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional yakni membuat tim khusus pengendalian inflasi pusat dan daerah, pengendalian inflasi pangan nasional, dana insentif dan belanja serta subsidi ke kelompok sasaran yang lebih tepat.

Indonesia dapat dikatan berhasil menangani dan melewati masa krisis ekonomi di lima tahun terakhir dengan tingkat laju pertumbuhan ekonomi tidak terlalu jatuh terlalu dalam saat krisis terjadi (lebih resisten dari rata-rata laju pertumbuhan Dunia dan Asia-Selatan). Namun, masalah sosial-ekonomi yang terjadi dimasyarakat masih banyak yang perlu diperhatikan. Sebelum terjadinya krisis dan resesi ekonomi global baru-baru ini, bukankah isu sosial-ekonomi dimasyarakat sudah ada dan masih menjadi permasalahan bangsa selama ini?.



Gambar 1.2 Grafik tren persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 2013-2022 (sumber : BPS dan BAPPENAS)

Secara umum tren pertumbuhan ekonomi sangat stabil dan hanya mengalami guncangan di tahun 2020. Tren penurunan penduduk miskin pun selama 10 tahun ini mengalami penurunan sekitar 1,9%; namun berbeda dengan tingkat pengangguran hanya turun 0,02% saja atau bisa dianggap tidak ada perubahan sama sekali dari tahun 2013-2022. Ternyata stabilnya pertumbuhan ekonomi selama ini tidak begitu terlihat dari penurunan tingkat pengangguran di Indonesia. Jika masih ada penduduk yang tidak mendapatkan pekerjaan bagaimana mereka meningkatkan kemampuan ekonominya dan keluar dari klasifikasi penduduk miskin tadi?. Parahnya, selama 10 tahun kebelakang saja Indonesia hanya mampu menurunkan persentase penduduk miskin tidak lebih dari 2%, artinya butuh 40-50 tahun lagi (belum ditambah sejak merdeka tahun 1945) untuk menekan habis penduduk miskin dengan mengimbangi laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,19%. Pertanyaannya, apakah dengan indikator laju pertumbuhan bisa merepresentasikan pemerataan ekonomi masyarakat selama ini?, sesuai dengan amanat Pancasila sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dari beberapa sumber jurnal yang ada menyatakan untuk mengurangi kesejangan yang terjadi di sosial masyarakat salah satunya adalah pembayaran dari zakat (ZIS). Untuk itu, penelitian ini lebih khusus membahas mengenai seberapa besar andil ZIS terhadap isu sosial-ekonomi masyarakat.

Salah satu kewajiban umat muslim dalam kehidupan sosial masyarakat adalah kewajiban membayar zakat, infaq dan sedekah. Zakat adalah sebuah pembayaran baik itu kekayaan dan pendapatan individu yang wajib dilakukan setiap tahun dan

berlaku di dalam prinsip Islam sesuai dengan isi Al-Qur'an (Sura al Tawbah, 9:58-60). Dalam surat tersebut juga diperintahkan kepada umat Islam bahwa dana zakat akan dialirkan kepada kategori khusus yang berhak menerima yakni fakir miskin dan yang membutuhkan, kemudian diklasifikasikan ke dalam delapan golongan. Tujuan akhir dana zakat ini adalah menghilangkan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat. Kata zakat sendiri tidak hanya muncul dalam surat ini saja bahkan dalam al-qur'an kata zakat dibunyikan dan disebutkan oleh Allah SWT sebanyak 59 kali. Jika ditinjau dari sudut pandang sosial-ekonomi, Islam sendiri mengajarkan untuk peduli dan berbagi di dalam hidup bermasyarakat agar tidak terjadi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Adanya distribusi kekayaan dari si kaya kepada yang membutuhkan sehingga kesenjangan bisa diminimalisir dan tentunya roda perekonomian tumbuh dan berputar. Ketika kondisi sosial-ekonomi merata maka tercapai kesejahteraan bagi semua masyarakat, isu sosial yang terjadi sekarang pun dapat berkurang seperti yang dicita-citakan oleh negara ini melalui ideologi Pancasila.

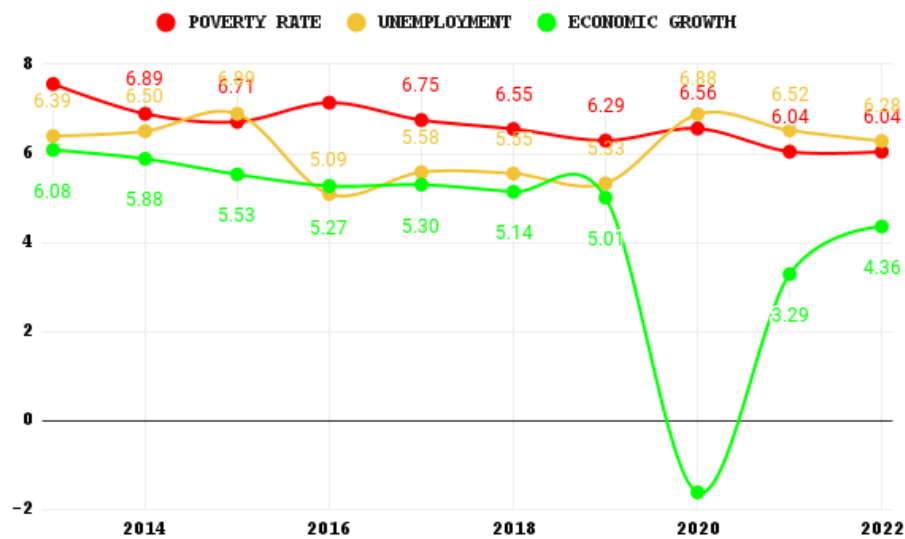
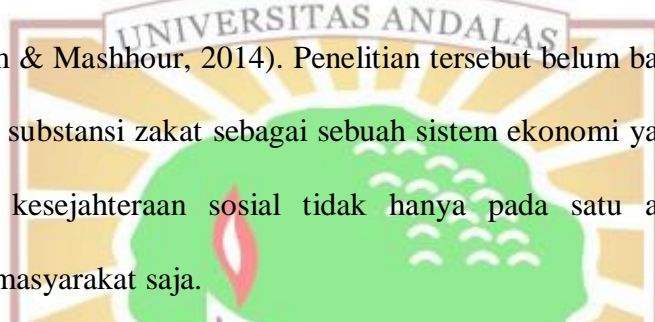
Menurut Mannan (1989) di dalam penelitian Saad & Foori (2020) zakat merupakan solusi sosial-ekonomi masyarakat dan dapat menggerakkan perekonomian suatu bangsa jika dana zakat dikelola secara baik dan sesuai prinsip hukum ekonomi syariah. Zakat merelokasi tabungan di bank atau bentuk simpanan uang dan menjadi alternatif dari sebuah penyimpanan yang dibiarkan diam/pasif dan distribusikan ke dalam perekonomian. Akibatnya permintaan di pasar meningkat dan merangsang produksi ekonomi. Stimulasi ini dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Sebaliknya, efek ini tidak

ditemukan pada sistem ekonomi konvensional (*non-zakat income*) dimana terjadi kebocoran pengeluaran seperti pajak dan biaya impor barang terutama kasus pada orang-orang kaya.

Zakat dalam perspektif instrumen ekonomi juga sudah dijelaskan oleh Yusuf Qardawi, 2013 dalam buku keduanya “Fiqh Al Zakah” bahwa zakat dapat dipakai sebagai indikator pengukuran ekonomi dan bisa diintegrasikan kedalam sistem keuangan serta dapat berpengaruh jika langsung diimplementasikan ke dalam aktivitas ekonomi sehingga dapat mencapai pembangunan berkelanjutan suatu bangsa. Din (1986) bahkan menambahkan peran zakat sebagai kebijakan fiskal suatu negara. Ketika dana zakat yang terkumpul di dibelanjakan ke dalam bentuk konsumsi dan produksi barang, sehingga rasio barang konsumsi terhadap barang produksi dapat digunakan sebagai instrumen fiskal. Ada dua kondisi berbeda, ketika masa ekspansi rasio ini akan menurun karena zakat digunakan untuk produksi. Pada kondisi resesi, rasio meningkat karena zakat didistribusikan untuk konsumsi barang sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi. Zakat juga dianggap sebagai *automatic fiscal stabilizer*, dimana zakat dengan tarif tetap berfungsi sebagai pajak proporsional, sehingga dapat mengurangi fluktuasi secara otomatis.

Beberapa penelitian baru-baru ini sudah banyak membahas mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan (Rahim et al., 2020; Mustika et al., 2019; Santos et al., 2019; Zhu et al., 2021; Benfica & Henderson, 2021; Haan et al., 2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran (Rumbia et al., 2022; ; Thurlow et al., 2019; Imran et al., 2015; Chowdhury & Hossain, 2014). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan kualitas

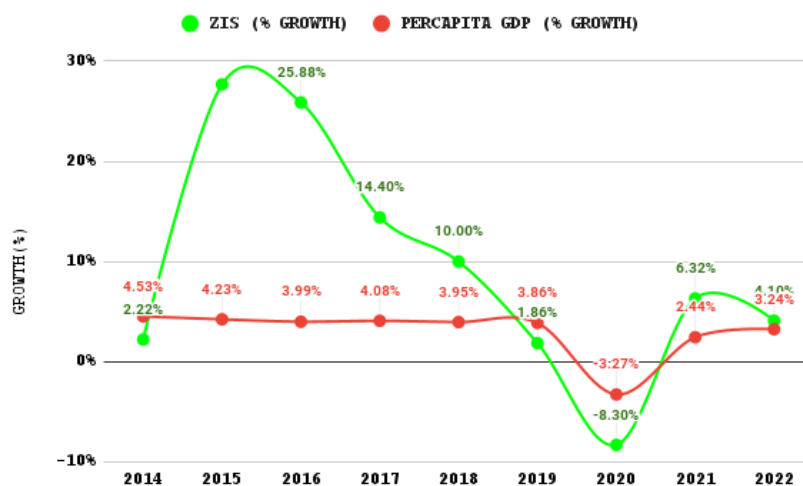
manusia baik dari segi kesehatan dan pendidikan (Wang et al., 2020; Croes et al., 2020; Stewart, 2019; Sarkodie & Adams, 2020; Nchofoung et.al, 2021; Yaya et al., 2020). Di lain sisi, penelitian mengenai Dana ZIS yang menjelaskan tentang hubungan dengan isu sosial-masyarakat masih sedikit, diantaranya hubungan Dana ZIS terhadap tingkat kemiskinan (Rahim et al., 2020; Lapopo, 2012; Khasandy et al., 2019; Abdullah et al., 2015; Qardawi, 2013) , pengangguran, dan kualitas perkembangan manusia (Pachmi et.al, 2019; Rédha et al., 2016; Saputro & Sidiq, 2020; Korayem & Mashhour, 2014). Penelitian tersebut belum banyak membahas secara spesifik substansi zakat sebagai sebuah sistem ekonomi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial tidak hanya pada satu atau dua proksi kesejahteraan masyarakat saja.



Gambar 1.3 Grafik tren persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2013-2022 (sumber :

BPS dan BAPPENAS)

Berdasarkan rilis data Kementerian Dalam Negeri per-Desember 2021 bahwa jumlah penduduk beragama Islam di Indonesia 86,9% dari total populasi. Sebagai representasi sistem ekonomi syariah maka penelitian akan dikhususkan di regional Provinsi Sumatera Barat dimana persentase penduduk Islam di atas angka nasional yakni 97,6% (5,6 juta jiwa) dari total populasi penduduk di Sumatera Barat. Jika melihat dinamika ekonomi dan kesejahteraan Sumatera Barat sepuluh tahun ini sangat menarik dan berbeda dengan kondisi nasional. Dari tahun 2013-2022 tren pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat mengalami penurunan bahkan sebelum terjadi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Namun persentase penduduk miskin pun juga mengalami penurunan, hal ini sangat kontradiksi dengan situasi nasional. Khusus di tahun 2019-2021, sistem keamanan masyarakat lewat kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun daerah mampu menahan efek buruk dari situasi krisis yang terjadi, bisa dilihat angka tingkat kemiskinan dan pengangguran tidak signifikan mengalami peningkatan.



Gambar 1.4 Grafik pertumbuhan Dana ZIS dan PDRB Perkapita Sumatera Barat

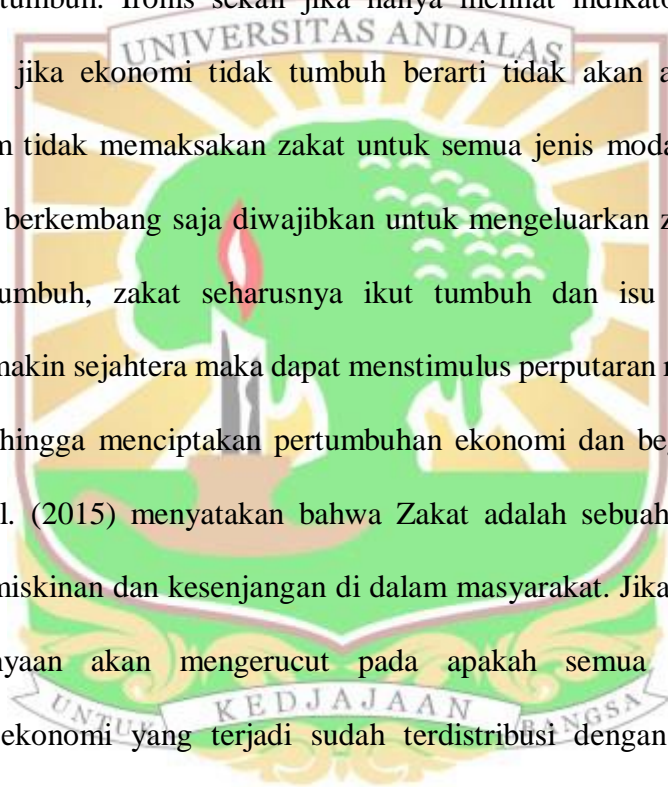
Tahun 2014-2022 (sumber : BPS dan Kementerian Agama RI)

Jika melihat pada perbandingan PDRB ADHK perkapita Provinsi Sumatera Barat dengan provinsi lainnya dari tahun 2013-2022, rata-rata PDRB ADHK perkapita Provinsi Sumatera Barat hanya berada di urutan 22 dari 35 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2022 rata-rata pendapatan perkapita penduduk Sumatera Barat hanya 32.377.514 rupiah/tahun. Namun jika dilihat dari gambar 4 menunjukkan pertumbuhan Dana ZIS lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Barat. Fenomena ini memperlihatkan kesadaran masyarakat Sumatera Barat terhadap kewajiban zakat sangat tinggi akibat manifestasi dari mayoritas penduduk beragama Islam di Sumatera Barat (berada di urutan ke-4 tertinggi nasional dalam pengumpulan dana ZIS). Tentu saja peran pengawasan pemerintah sangat baik di sini agar zakat tetap sebagai salah satu sistem keamanan ekonomi bagi masyarakat dan terdistribusi dengan tepat sasaran. Di lain aspek, zakat bagi masyarakat Sumatera Barat merupakan gambaran solidaritas dan kepedulian sosial yang tinggi serta dapat meluas kesemua sendi-sendi kehidupan bermasyarakat sesuai cita-cita pancasila.

Peran BAZNAS pada situasi ini juga tidak boleh dilupakan, pada periode tersebut kebijakan distribusi ZIS (Zakat, infaq, dan sedekah) secara nasional lebih besar dianggarkan untuk sosial-kemanusiaan (49,58%), pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Sesuai data Kementerian Agama dan BPS, Sumatera Barat dalam pengumpulan Dana ZIS mengalami peningkatan sejak tahun 2013, yakni sebesar

(113,73%) dan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat berada di urutan ke-4 terbesar dalam pengumpulan dana ZIS se-Indonesia.

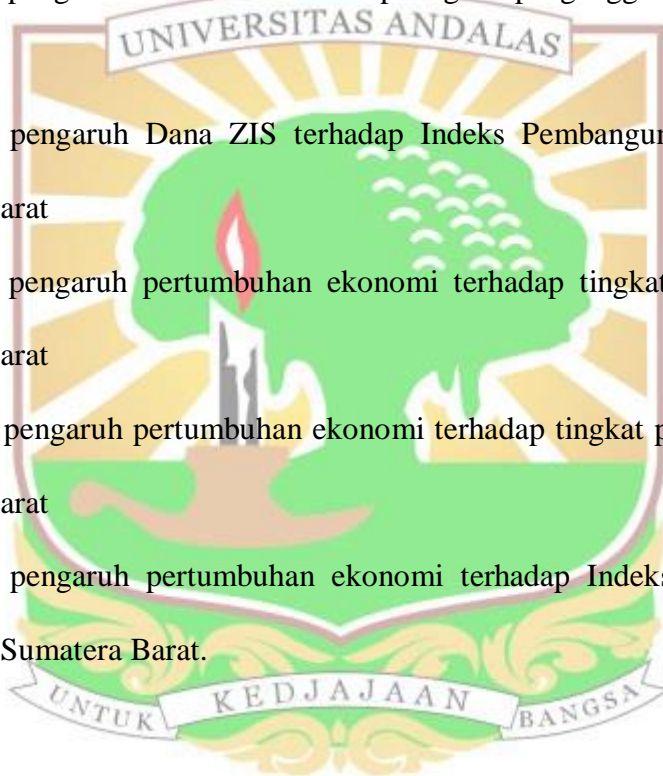
Secara tegas Yusuf Qardawi (2013) menyatakan zakat adalah sebuah pilar dalam ilmu ekonomi Islam dan landasan dasar sistem asuransi sosial. Zakat akan mampu menciptakan siklus perputaran ekonomi di dalam masyarakat dan bertumbuh dengan sendiri, karena makna kata zakat itu sendiri di dalam Bahasa Arab artinya tumbuh. Ironis sekali jika hanya melihat indikator pertumbuhan ekonomi saja, jika ekonomi tidak tumbuh berarti tidak akan ada orang yang berzakat. Islam tidak memaksakan zakat untuk semua jenis modal, hanya modal dan aset yang berkembang saja diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Faktanya, ekonomi bertumbuh, zakat seharusnya ikut tumbuh dan isu sosial-ekonomi berkurang, semakin sejahtera maka dapat menstimulus perputaran roda ekonomi di masyarakat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi dan begitu seterusnya. Abdullah et al. (2015) menyatakan bahwa Zakat adalah sebuah formula untuk mereduksi kemiskinan dan kesenjangan di dalam masyarakat. Jika dipahami lebih lanjut, pertanyaan akan mengerucut pada apakah semua kekayaan atas pertumbuhan ekonomi yang terjadi sudah terdistribusi dengan baik sehingga ketimpangan dan kesenjangan sosial berkurang hari demi hari atau memang banyak manusia yang menumpuk kekayaan dan menahan hartanya yang justru itu malah berakibat buruk pada pertumbuhan ekonomi itu sendiri?.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini lebih khusus meneliti tentang pengaruh dari Dana ZIS dan membahas masalah tentang penilaian pengelolaan Dana ZIS baik itu dari pengumpulan sampai ke pendistribusian dana. Dengan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Dana ZIS terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat
2. Bagaimana pengaruh Dana ZIS terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Barat
3. Bagaimana pengaruh Dana ZIS terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat
5. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Barat
6. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat.



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

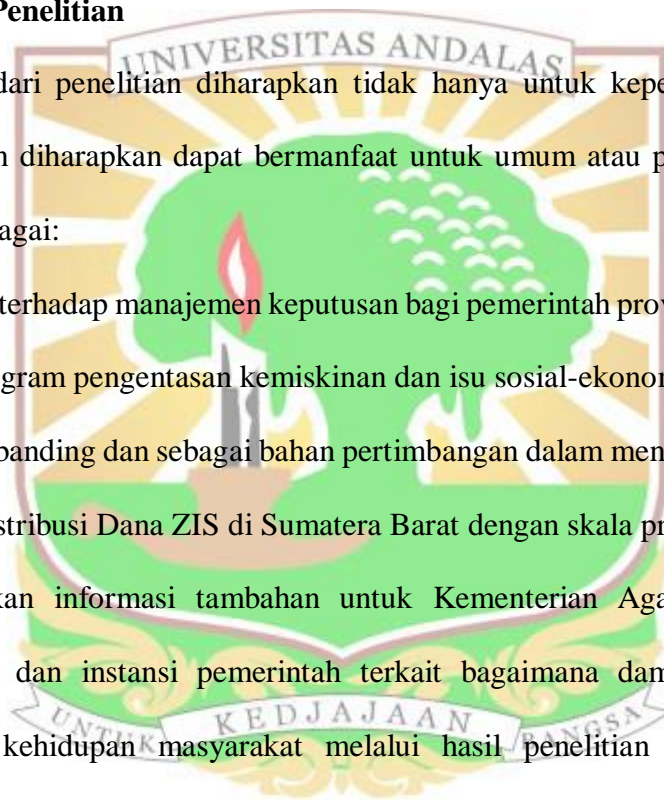
1. Pengaruh Dana ZIS terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat
2. Pengaruh Dana ZIS terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Barat
3. Pengaruh Dana ZIS terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat

4. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat
5. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Barat
6. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan tidak hanya untuk kepentingan pribadi peneliti namun diharapkan dapat bermanfaat untuk umum atau publik dan dapat digunakan sebagai:

- a. Implikasi terhadap manajemen keputusan bagi pemerintah provinsi atau daerah dalam program pengentasan kemiskinan dan isu sosial-ekonomi masyarakat
- b. Data pembandingan dan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan alokasi distribusi Dana ZIS di Sumatera Barat dengan skala prioritas
- c. Memberikan informasi tambahan untuk Kementerian Agama, BAZNAS, LAZNAS dan instansi pemerintah terkait bagaimana dampak Dana ZIS terhadap kehidupan masyarakat melalui hasil penelitian studi kasus di Sumatera Barat ini
- d. Literatur dan referensi tambahan untuk akademisi dalam menulis penelitian yang berhubungan dengan Dana ZIS, sosial-ekonomi masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah/negara.



1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap :

- a. Bab I Pendahuluan; penjelasan tentang fenomena penelitian yang terkait dengan judul penelitian, daya tarik penelitian dibanding dengan penelitian lain, fenomena-fenomena umum yang ada yang kemudian berfokus kepada fenomena khusus yang akan dijadikan variabel dalam penelitian, tujuan penelitian yang akan dicapai sesuai rumusan masalah, manfaat penelitian berkaitan dengan implikasi hasil penelitian baik terhadap teori, praktek manajemen, maupun terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat ataupun dalam penyusunan kebijaksanaan
- b. Bab II Tinjauan literatur; teori dan pandangan penelitian terdahulu berhubungan atau relevan dengan variabel-variabel penelitian yang diperlukan untuk memberikan pemantapan dan penegasan tentang ciri khas serta yang mendasari penelitian
- c. Bab III Metodologi penelitian; desain penelitian, populasi, dan sampel penelitian, definisi operasional serta pengukuran variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan prosedur pengujian hipotesisnya
- d. Bab IV Analisis dan hasil penelitian data; gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian
- e. Bab V Penutup; hasil pengolahan data dalam bentuk rangkuman kata, implikasi penelitian, kelemahan dan keterbatasan dari penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya agar bisa menyempurnakan kekurangan dari penelitian ini.